



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Paket Kebijakan untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan

Prof. Bambang Brodjonegoro
Menteri Keuangan RI

Konferensi Pers
Jakarta, 17 September 2015



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kementerian Keuangan Republik Indonesia



Kebutuhan menciptakan anggaran yang lebih sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

...baik kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang

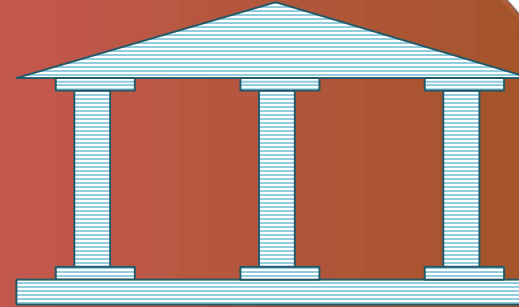
TANTANGAN EKONOMI

Masalah Struktural

Kondisi Ekonomi Global

strategi **JANGKA PANJANG** melalui

BUDGET REFORM



Optimalisasi Pendapatan Negara

Kualitas Belanja

Kesinambungan Sumber Pembiayaan

MENCIPTAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, ADIL, DAN MERATA

strategi **JANGKA PENDEK** melalui

STIMULUS FISKAL

Penyerapan anggaran

Peningkatan daya beli

Insentif dunia usaha

Kebijakan lainnya

MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI MELEWATI KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL



APBN terkini disusun untuk menjawab tantangan ekonomi terkini, baik global maupun domestik

...perubahan struktural HARUS dilakukan SEKARANG dan dalam jangka menengah maupun panjang

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan merata

OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA

Reinventing policy; e-faktur;
Compliance risk management;
Pajak sumber daya alam;
Perbaikan administrasi pajak; Revisi regulasi perpajakan (amandemen UU, KUP, UU PPh, UU PPN),
Pembentukan Badan Khusus Pengelolaan Pajak,

- Mengalihkan sumber pendapatan yang bersumber dari komoditas
- Memperluas cakupan basis pendapatan
- Meningkatkan tingkat kepatuhan pajak
- Menghindari kebocoran pajak, terutama restitusi PPN
- Memperkuat institusi pajak

KUALITAS BELANJA

Perubahan skema subsidi BBM; Kenaikan signifikan anggaran infrastruktur, kesejahteraan rakyat dan PMN untuk BUMN; Cashless smart cards; Dana desa; Memberdayakan pemerintah daerah; Skema subsidi untuk sektor lain

- Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan merata
- Mengalihkan belanja konsumtif ke produktif
- Merancang skema target subsidi yang lebih tepat sasaran
- Mengoptimalkan pemerintah daerah untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi

KESINAMBUNGAN SUMBER PEMBIAYAAN

Defisit anggaran yang terjaga;
Menggunakan sumber pembiayaan bilateral dan multilateral yang kompetitif; Jenis instrumen pembiayaan yang beragam (kurs, produk, jangka waktu).

- Menjaga pembiayaan APBN yang sehat
- Menggunakan surat utang domestik dan internasional secara efektif dan efisien
- Mengoptimalkan skema pembiayaan kepada BUMN guna mendukung program belanja infrastruktur.



PEMBENTUKAN TEPRA

Untuk mengawasi realisasi APBN dan APBD pada setiap tahun anggaran berjalan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP

Keppres No. 20/2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)

PERBAIKAN PENGADAAN BARANG dan JASA

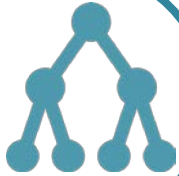
Untuk mendorong optimalisasi belanja negara melalui kewajiban pemakaian tender elektronik (e-tendering), e-purchasing, dan percepatan waktu pengadaan barang dan jasa.

Perpres No. 4/2015 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

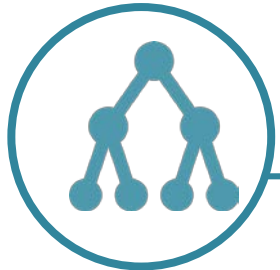
PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Untuk mempercepat realisasi program prioritas pemerintah, khususnya pembangunan infrastruktur menengah melalui BUMN. Sumber pembiayaan BUMN juga berpotensi bertambah karena leverage effect melalui penerbitan obligasi perusahaan.

Pencairan PMN dilakukan berdasarkan PP per masing-masing BUMN yang ditunjuk. Per Agustus 2015 telah direalisasikan lebih kurang 50% dari total PMN yang dianggarkan dalam APBNP 2015



#AKSELERASI PENYERAPAN ANGGARAN (1)



#AKSELERASI PENYERAPAN ANGGARAN (2)

PENYERMPURNAAN SKEMA KPS

untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, melalui *land fund*, *project development*, penjaminan pemerintah, *viability gap fund*, *availability payment*, *infrastructure fund*. Proyek yang diprioritaskan adalah proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang namun rumit dan berisiko pada pembangunan proyeknya.

*PP No. 38/2015 tentang KPS untuk infrastruktur dan
Perpres No. 82/2015 tentang jaminan pembiayaan infrastruktur melalui lembaga keuangan internasional kepada
BUMN*

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PEMERINTAH YANG LEBIH BAIK

Pencegahan kriminalisasi terhadap pengambilan kebijakan pemerintah

*UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan
Surat Edaran Seskab kepada para Kepala Daerah*



DANA DESA

Untuk memberikan dukungan bagi pembangunan infrastruktur dasar di daerah dengan mencanangkan sekitar 3 – 4 proyek pengembangan infrastruktur untuk setiap desa

Jumlah Dana Desa yang dianggarkan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp. 20,8 T dengan 70% dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur ditambah dengan ADD dari APBD



#PENINGKATAN DAYA BELI

PENINGKATAN BATAS PTKP

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

PMK No. 122/2015 mengenai penyesuaian PTKP dari Rp 24,3 Juta menjadi Rp 36 Juta

PENGHAPUSAN KEBIJAKAN PPnBM

Untuk mendorong perkembangan pasar barang mewah, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, mengurangi penyelundupan dan duplikasi, serta menurunkan kecenderungan masyarakat untuk berbelanja di luar negeri.

PMK No. 106/2015 mengenai penghapusan kebijakan PPnBM atas peralatan elektronik, alat olahraga, alat musik, Branded Goods, dan peralatan rumah dan kantor

KEBIJAKAN TAMBAHAN RASKIN 2 BULAN

Untuk mendorong kedaulatan pangan dan menjaga kenaikan harga beras, pemerintah memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme penyerahan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin)

Penambahan waktu penyaluran raskin selama 2 bulan (ke-13 dan ke-14) yang akan diberikan kepada sekitar 15,5 juta penduduk miskin pada masa paceklik panen beras (pada akhir tahun)



TAX ALLOWANCE

Untuk meningkatkan daya tarik investasi dengan mempertimbangkan nilai investasi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja, reinvestasi keuntungan di dalam negeri, melakukan kegiatan riset dan pengembangan teknologi, menggunakan produk domestik, dan berorientasi ekspor.

PP No. 18/2015 dan PMK No.89/2015 mengenai fasilitas tax allowance dengan memperluas cakupan investasi, penambahan jangka waktu fasilitas, mengatur batas waktu penyelesaian permohonan, memperluas sektor industri dan cakupan daerahnya.

TAX HOLIDAY

Untuk meningkatkan industri pionir yang memiliki nilai investasi dan nilai strategis bagi perekonomian dan eksternalitas yang tinggi.

Penentuan Tax Holiday dilakukan melalui trilateral meeting yang dipimpin oleh BKPM.

PMK No. 159/2015 yang mengatur tentang fasilitas tax holiday mencakup perluasan nilai investasi, memperpanjang jangka waktu fasilitas, besaran fasilitas yang kompetitif, mengatur batas waktu penyelesaian permohonan, dan perluasan industri yang dituju.

BADAN PENGELOLA DANA SAWIT

Untuk mendorong pengembangan sektor perkebunan khususnya kelapa sawit dengan menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan

PMK No. 113/2015 tentang penghimpunan dana CSF yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit



#INSENTIF
DUNIA USAHA
(1)



PENUGASAN LPEI DAN PROGRAM NIA

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, khususnya para pelaku industri yang berorientasi ekspor agar dapat terus menjaga kelangsungan usahanya tanpa melakukan PHK, dengan memberikan suku bunga murah melalui program National Interest Account (NIA) dan mengoptimalkan peran Lembaga Penjamin Ekspor Impor (LPEI) Indonesia

PMK No. 134/PMK.08/20015 tentang penugasan khusus LPEI melalui National Interest Account (NIA) untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor

INSENTIF PAJAK BAGI JASA KEPELABUHANAN

Untuk memberikan insentif PPN bagi angkutan laut luar negeri yang diharapkan dapat menurunkan biaya transportasi barang dan meningkatkan daya saing produk domestik

Revisi atas PP No. 146/2000 yang mengatur bahwa objek jasa kepelabuhanan yang mendapat fasilitas pembebasan PPN atas jasa-jasa tertentu

INSENTIF PAJAK BAGI SEKTOR PROPERTI

Untuk meningkatkan daya saing dan industri di sektor properti yang diharapkan juga dapat memberikan *spillover effect* terhadap pertumbuhan sektor pengolahan dan konstruksi

PMK No. 106/PMK.010/2015 tentang PPnBM atas hunian mewah, revisi atas PP No. 41/1996 tentang kepemilikan properti oleh WNA, dan

Program sejuta rumah , Kementerian Keuangan memberi dukungan lahan seluas 381 hektar dengan nilai perolehan Rp. 1,43T



#INSENTIF
DUNIA USAHA
(2)



PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pemerintah memberikan insentif di KEK yang lebih menarik dibanding kawasan lainnya agar KEK bisa menjadi pusat pertumbuhan yang berdaya saing tinggi

Fasilitas khusus tersebut di antaranya adalah semua jenis industri utama/industri prioritas di KEK bisa mendapatkan tax holiday, jangka waktu pemberian tax holiday yang lebih panjang s.d. 25 tahun, serta dimungkinkan nilai minimum investasi yang lebih rendah dari Rp. 1 triliun untuk mendapatkan tax holiday, fasilitas bebas PPN, Bea Masuk dan Cukai, dan Inland FTA

PUSAT LOGISTIK BERIKAT

Pusat Logistik Berikat untuk tempat penimbunan barang dari dalam dan ke luar negeri untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha

Kawasan berikat untuk pengolahan

INSENTIF PAJAK BAGI INDUSTRI GALANGAN KAPAL

Untuk meningkatkan produktivitas galangan kapal nasional dan memperkuat industri galangan kapal nasional sehingga program poros maritim yang dicanangkan pemerintah bisa berjalan, pemerintah memberikan fasilitas fiskal pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut

Revisi atas PP No. 38/2003 yang akan mengubah fasilitas PPN dari dibebaskan menjadi tidak dipungut

SUBSIDI BUNGA KUR

Sesuai dengan strategi pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat UMKM dan pengembangan sumber pembiayaan melalui pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan dan subsidi bunga secara terpadu, melalui pemberian stimulus fiskal pada UMKM. Suku Bunga KUR menjadi 12%

PMK No. 146/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat



#INSENTIF
DUNIA USAHA
(3)



PENAMBAHAN BEBAS VISA

Untuk mendorong pertumbuhan potensial lainnya di sektor jasa untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan, khususnya di sektor pariwisata

PP No. 69/2015 mengenai bebas visa kunjungan dari 15 menjadi 45 negara

DEBT TO EQUITY RATIO

Untuk memperkuat sistem keuangan dalam negeri, maka pemerintah akan meluncurkan kebijakan Debt to Equity Ratio tertentu. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan capital inflow dan menekan utang luar negeri swasta.

Kebijakan ini akan mencakup seluruh utang yang dilakukan perusahaan, baik utang luar negeri maupun dalam negeri pada sektor tertentu.

OPTIMALISASI DWELLING TIME

Untuk memperbaiki waktu keluar masuk barang di pelabuhan (dwelling time) untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan menekan biaya logistik

PMK No. 136/2015 mengenai penetapan barang ekspor untuk mempermudah proses keluar masuk barang pada proses pemeriksaan bea dan cukai

HILIRISASI MINERAL

Untuk peningkatan daya saing produk Anode Slime sebagai produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam tembaga sehingga memberikan nilai tambah

Kebijakan PP mengenai PPN yang tidak dipungut atas penyerahan Anode Slime



**#KEBIJAKAN
LAINNYA**



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

TERIMA KASIH

Kementerian Keuangan Republik Indonesia